



Strategi Pengembangan Pantai Wediombo Sebagai Salah Satu Daya Tarik Wisata Unggulan Di Kabupaten Gunungkidul, **Eko Martanto, Riska Rahmawati**

Upaya Peningkatan Kinerja Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Di Polres Sleman, **Agung Untoro, Uswatun Chasanah**

Peran Variabel Mediasi Kepuasan Pelanggan Pada Pengaruh Iklan Berbasis Media Sosial Instagram Terhadap Minat Beli Ulang Mie Gacoan Di Yogyakarta, **Niken Hartanti, Muhammad Mathori**

Kualitas Produk, Harga Dan Citra Merek: Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian, **Aizahra Nuraini, Nita Fitriana**

Pengaruh Persepsi Harga, Lokasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Matapisau Barbershop Yogyakarta, **Heri Fitrianto, Suci Utami Wikaningtyas**

Pengaruh Marketing Mix Terhadap Minat Beli Pada Indomaret Studi Pada Indomaret Sewon Bantul, **Hasti Winartanti, Dila Damayanti**

Pengaruh Produk, Harga, Lokasi, Dan Promosi Terhadap Minat Beli Pengunjung Pusat Oleh Oleh Adrem Khas Sanden Bantul, **Siska Hervina Selviyani, Lukia Zurida**

Pengaruh Return On Asset (ROA), Price Earning Ratio (PER), Operating Profit Margin (OPM) Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Studi Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2019), **R.A. Nurdamayati Ayu Puspa Wardani, Zulkifli**

Pengaruh Regulasi, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Aplikasi SIPD Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Magelang, **Evi Erliyani, Sulastiningsih**

Pengaruh Motivasi Kerja, Komunikasi, Stres Kerja, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Studi Kasus Pada Karyawan PT Karya Niaga Abadi (JnT Express) Cabang Bantul Yogyakarta, **Yuriatun, Muhammad Awal Satrio Nugroho**

Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Ms Glow Di Pacitan, **Clarissa Paulina Audry, Yunita Fitri Wahyuningtyas**

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Omset Penjualan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Krecek Bu Iplik, **Wiwien Ika Fitriani, Muhammad Subkhan**

Pengaruh Person Organization Fit Terhadap Motivasi Dan Kinerja Guru Di MAN 3 Yogyakarta, **Qurrata A'yunina Ciptantri Hadipranata, Muhammad Robi Nurwahyudi, Eka Ambara**

Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Utama Jasa Transportasi Yang Ada Di Bursa Efek Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Periode 2018-2021, **Irwan Yuliana, Prafidhya Dwi Yulianto, Dwi Novitasari**

Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan Dan Promosi Terhadap Kepuasan Konsumen, **Fatimatul Nur Wahidah, Anisa Nur Rokhmah, Amelia Rismawati, Kartika Sugiarti, Nawang Maulida Kuswanto, Yenni Kurnia Gusti**

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, **Agustina Hoar Seran, Priyastiwi**

Pengaruh Social Media Dan Marketplace Marketing Terhadap Perilaku Impulse Buying Dengan Digital Payment Sebagai Moderating, **Evi Rosalina Widyayanti**

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2020, **Heri Susanto, Achmad Tjahjono**

Pengaruh Lingkungan Kerja, Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Mediasi Studi Kasus: Karyawan PT. BPR Chandra Muktiartha, **Annisa Nur Rochmah, Suhartono**

Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Kinerja Perusahaan Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar BEI Tahun 2016-2021, **Wulandari, Muda Setia Hamid**



CURRENT

ARCHIVES

EDITORIAL TEAM

REVIEWER

CONTACT

ABOUT THE JOURNAL

Q SEARCH

HOME / ARCHIVES / Vol. 3 No. 4 (2023): Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia

Vol. 3 No. 4 (2023): Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia



DOI: <https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i4>

PUBLISHED: 2023-12-28

ARTICLES

Make a Submission

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

**STRATEGI PENGEMBANGAN PANTAI WEDIOMBO SEBAGAI SALAH SATU DAYA
TARIK WISATA UNGGULAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Eko Martanto, Riska Rahmawati

1127 – 1144



PDF

**UPAYA PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN
KEPOLISIAN (SKCK) DI POLRES SLEMAN**

Agung Untoro, Uswatun Chasanah

1145 – 1158



PDF

**PERAN VARIABEL MEDIASI KEPUASAN PELANGGAN PADA PENGARUH IKLAN
BERBASIS MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP MINAT BELI ULANG MIE
GACOAN DI YOGYAKARTA**

Niken Hartanti, Muhammad Mathori

1159 – 1173



PDF

**KUALITAS PRODUK, HARGA DAN CITRA MEREK: PENGARUHNYA TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBELIAN**

Aizahra Nuraini, Nita Fitriana

1174 – 1188



PDF

**PENGARUH PERSEPSI HARGA, LOKASI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP
KEPUASAN PELANGGAN PADA MATAPISAU BARBERSHOP YOGYAKARTA**

Heri Fitrianto, Suci Utami Wikaningtyas

1189 – 1209



PDF

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 2808-1617

ISSN 2808-1617



TOOLS

PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP MINAT BELI PADA INDOMARET

Studi Pada Indomaret Sewon Bantul

Hasti Winartanti, Dila Damayanti

1210 – 1232

**PENGARUH PRODUK, HARGA, LOKASI, DAN PROMOSI TERHADAP MINAT BELI PENGUNJUNG PUSAT OLEH OLEH ADREM KHAS SANDEN BANTUL**

Siska Hervina Selviyani, Lukia Zurida

1233 – 1255

**PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), PRICE EARNING RATIO (PER), OPERATING PROFIT MARGIN (OPM) DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN STUDI PADA PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2019**

R.A. Nurdamaiyati Ayu Puspa Wardani, Zulkifli Zulkifli

1256 – 1278

**PENGARUH REGULASI, PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENERAPAN APLIKASI SIPD TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG**

Evi Erliyani, Sulastiningsih Sulastiningsih

1279 – 1303

**PENGARUH MOTIVASI KERJA, KOMUNIKASI, STRES KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA**

zotero

INDEXING LIST**Support By****VISITORS**

Studi Kasus Pada Karyawan PT Karya Niaga Abadi (JnT Express) Cabang Bantul Yogyakarta

Yuriatun Yuriatun, Muhammad Awal Satrio Nugroho

1304 – 1327

 PDF

PENGARUH CITRA MEREK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN MS GLOW DI PACITAN

Clarissa Paulina Audry, Yunita Fitri Wahyuningtyas

1328 – 1344

 PDF

STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN OMSET PENJUALAN PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) KRECEK BU IPIK

Wiwien Ika Fitriani, Muhammad Subkhan

1345 – 1370

 PDF

PENGARUH PERSON ORGANIZATION FIT TERHADAP MOTIVASI DAN KINERJA GURU DI MAN 3 YOGYAKARTA

Qurrata A'yunina Ciptantri Hadipranata, Muhammad Robi Nurwahyudi, Eka Ambara

1371 – 1385

 PDF

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN UTAMA JASA TRANSPORTASI YANG ADA DI BURSA EFEK INDONESIA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI PERIODE 2018-2021

Irwan Yuliana, Prafidhya Dwi Yulianto, Dwi Novitasari

1386 – 1399

 PDF

PENGARUH HARGA, KUALITAS PELAYANAN DAN PROMOSI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN

Fatimatul Nur Wahidah, Anisa Nur Rokhmah, Amelia Rismawati, Kartika Sugiarti, Nawang Maulida Kuswanto, Yenni Kurnia Gusti 1400 – 1418

 PDF

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Agustina Hoar Seran, Priyastivi Priyastivi 1419 – 1440

 PDF

PENGARUH SOCIAL MEDIA DAN MARKETPLACE MARKETING TERHADAP PERILAKU IMPULSE BUYING DENGAN DIGITAL PAYMENT SEBAGAI MODERATING

Evi Rosalina Widyayanti 1441 – 1469

 PDF

PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2020

Heri Susanto, Achmad Tjahjono 1470 – 1497

 PDF

PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, KOMPENSASI, DISIPLIN KERJA DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI MOTIVASI

KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Studi Kasus: Karyawan PT. BPR Chandra Muktiartha

Annisa Nur Rochmah, Suhartono Suhartono, Rufaida Setyawati

1498 – 1527



PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN INTELLECTUAL CAPITAL (IC) TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar BEI Tahun 2016-2021

Wulandari Wulandari, Muda Setia Hamid

1528 – 1559



Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia

Jl. Lowanu Sorosutan UH VI / 20, Sorosutan, Kota Yogyakarta, DIY
55162

Email: jrabi@stieww.ac.id

JRABI is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Platform &
workflow by
OJS / PKP

PENGARUH REGULASI, PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENERAPAN APLIKASI SIPD TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG

Evi Erliyani¹, Sulastiningsih²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
raditseto25@gmail.com¹, sulastiningsih@stieww.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh regulasi, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, dan penerapan aplikasi SIPD terhadap penyerapan anggaran belanja. Penelitian ini menggunakan sampel pegawai yang bekerja di SKPD Kabupaten Magelang sebanyak 19 Dinas, 5 Badan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan 5 Kecamatan. Jumlah sampel penelitian ini adalah 59 responden, berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu aparat pemerintah daerah Kabupaten Magelang yang menduduki jabatan yang berkaitan dengan anggaran, antara lain Kasubbag Keuangan, PPTK, Bendahara Pengeluaran, dan Staf bagian Keuangan dan Perencanaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja, sedangkan regulasi, perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan aplikasi SIPD tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.

Kata Kunci: Regulasi, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Aplikasi SIPD.

PENDAHULUAN

Penerapan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan agar pemerintah mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dengan pemberian bantuan dana untuk menjalankan kewenangan tersebut.

Salah satu permasalahan dalam anggaran pemerintah adalah penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun menyebabkan ketidakmerataan penyerapan anggaran (Suwarni & Ma'ruf, 2018). Disebutkan pula dalam *World Bank*, 2015 bahwa Negara-negara berkembang seperti Indonesia mempunyai permasalahan yang sama dalam penyerapan anggaran yang disebut "*slow back-loaded*", artinya penyerapan anggaran yang rendah pada semester

pertama, namun akan melonjak memasuki akhir tahun anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran merupakan masalah yang sering dihadapi disetiap tahun anggaran. Keterlambatan realisasi anggaran menumpuk di akhir tahun berdampak pada kualitas kinerja pemerintah. Permasalahan ini dapat menghambat proyek yang ada dan akhirnya mengganggu laju pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut (Iqbal, 2018).

Selaras dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SKPD berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui realisasi anggaran dan belanja. Penyerapan anggaran yang lambat perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal yang akan berdampak pada sasaran kinerja SKPD.

Fenomena penyerapan anggaran belanja ini juga terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang. Keterlambatan penyerapan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya meliputi kesiapan satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan, pemahaman satuan kerja dalam mekanisme pelaksanaan pencairan anggaran, proses dalam pengadaan barang dan jasa dan berbagai faktor internal lainnya.

Tabel 1.1
Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Langsung
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2016- 2021

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran
1	2016	736.019.704.020	631.894.938.270	85,85
2	2017	1.254.128.725.778	813.127.360.968	64,84
3	2018	1.081.595.238.628	958.693.240.730	88,64
4	2019	1.144.681.295.144	962.676.969.216	84,10
5	2020	2.481.966.204.287	2.207.638.240.481	88,95
6	2021	2.653.241.125.616	2.653.241.125.616	87,39

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang

Realisasi serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2016–2021 masih dibawah kisaran 90 persen. Capaian kinerja APBD Kabupaten Magelang tahun anggaran 2016 pada akhir tahun anggaran capaian penyerapan anggaran belanja langsung mencapai 85,85 persen, dan turun menjadi 64,84 persen ditahun 2017, kemudian kembali membaik di tahun 2018 menjadi 88,64 persen. Data ini menjelaskan bahwa daya serap anggaran belanja pemerintah Kabupaten Magelang belum maksimal karena belum sesuai dengan target yang diinginkan. Tahun Anggaran 2021, dari total alokasi untuk Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) sebesar Rp2.653.241.125.616,00, yang digunakan untuk membiayai 1.385 sub kegiatan, sampai dengan akhir tahun anggaran hanya terserap sebesar Rp2.653.241.125.616,00 atau hanya 87,39 persen dari target 100,00 persen, kesenjangan cukup besar yaitu 12,61 persen.

Faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran antara lain adalah faktor regulasi, regulasi digunakan oleh SKPD dalam mewujudkan kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada. Namun dikarenakan banyaknya aturan

yang berubah secara cepat sementara waktu pelaksanaan yang terbatas, sehingga dalam pelaksanaan anggaran mengalami kendala dalam pelaksanaannya dari suatu kegiatan yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran di instansi pemerintah.

Penelitian Alimudin (2018) menyatakan bahwa regulasi berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Faktor penyebab ketidakmerataan penyerapan anggaran berkaitan dengan faktor regulasi karena regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat justru membuat penyerapan APBD di pemerintahan daerah mengalami ketidakmerataan. Oleh karena itu strategi yang dapat diberikan terkait pemmasalahan pada regulasi tersebut salah satunya adalah dengan adanya kebijakan penyerapan anggaran, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut penyerapan anggaran yang diperoleh dapat semaksimal mungkin (Salamah, 2018).

Hasil penelitian Ramadhani & Setiawan (2019) juga menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, salah satunya disebabkan regulasi yang dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai mengenai peraturan yang ada. Akan tetapi, hasil penelitian yang menyebutkan bahwa faktor regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran tidak didukung oleh hasil penelitian Rifai & Inapty (2016) yang menyatakan sebaliknya, bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Oleh karena itu faktor regulasi terdapat ketidakkonsistenan hasil yang mempengaruhi faktor regulasi.

Faktor lemahnya perencanaan juga menjadi kendala pada saat pembuatan perencanaan yang menyebabkan penyerapan anggaran menjadi lambat. Dalam penelitian Ramadhani & Setiawan (2019) menyebutkan faktor yang berpengaruh besar terhadap penyerapan anggaran adalah faktor perencanaan, karena semakin matang aparatur pemerintah sebagai pengelola anggaran dalam merencanakan maka kegiatan/program yang ditargetkan akan berjalan dengan baik pula. Hasil penelitian yang dilakukan Dwiwana (2017) juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Iqbal (2018) yang menyatakan bahwa faktor perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai & Inapty (2016) yang menyatakan sebaliknya bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan koordinasi yang baik di semua tingkatan pada semua instansi / dinas dan satuan pelaksana yang terkait, untuk menghindari adanya tumpang tindih atau *over lapping*. Oleh karena itu, semakin baik pelaksanaan anggaran, maka akan dapat mempengaruhi penyerapan anggaran. Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran (Ramdhani & Anisa, 2017).

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparat yang mengelola keuangan juga menjadi faktor penyerapan anggaran. Hal ini sesuai dengan penelitian Renoat & Latupeirissa (2016) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan harus memiliki pengetahuan, kemampuan, motivasi dan persepsi yang baik. Keterbatasan SDM yang ada di antaranya adalah kurangnya jumlah pegawai, adanya perangkapan pekerjaan, dan pola mutasi yang tidak merata.

Penelitian Anfujatin (2016) menyatakan permasalahan sumber daya manusia terjadi berawal dari rangkap tugas, hal ini karena tidak seimbangnya antara jumlah tugas dan fungsi dengan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan sehingga mengakibatkan belum optimalnya dalam penyerapan anggaran. Sumber daya manusia merupakan faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) berpengaruh pada penyerapan anggaran, yang dilakukan oleh Mutmainna (2017). Akan tetapi, hasil penelitian yang menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia berpengaruh pada penyerapan anggaran ternyata tidak didukung oleh hasil penelitian Alimudin (2018), Ramadhani & Setiawan (2019) yang menyatakan sebaliknya bahwa sumber daya manusia tidak mempengaruhi penyerapan anggaran.

Menyusul telah disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, seluruh SKPD di Kabupaten Magelang sudah tidak menggunakan aplikasi SIMDA lagi, melainkan untuk sekarang ini menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi ini wajib digunakan oleh seluruh pemerintahan daerah mulai awal tahun 2021, karena aplikasi ini pada awal tahun 2021 masih dalam tahap uji coba maka terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh seluruh SKPD sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran di Kabupaten Magelang.

Penelitian ini merupakan mengembangkan dari penelitian Ramadhani & Setiawan (2019), dengan perbedaan yang **pertama**, yaitu menambah variabel independen Penerapan Aplikasi SIPD bahwa setiap pemerintahan daerah di tingkat propinsi, kabupaten/kota wajib menggunakan Aplikasi SIPD yang menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik; meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien. Penggunaan variabel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa optimalnya penggunaan aplikasi SIPD pada proses penatausahaan keuangan yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Perbedaan **kedua** adalah objek penelitian di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. SKPD bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan visi misi Bupati terpilih selama lima tahun kedepan. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi akan mencerminkan tercapainya program dan kegiatan yang seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kabupaten Magelang masih memiliki permasalahan dalam tingkat penyerapan anggaran, dimana pada Kabupaten Magelang sendiri tingkat penyerapan anggarannya masih di bawah target yaitu kisaran 90% dan naik turun pada setiap tahunnya (BPPKAD Kabupaten Magelang).

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tingkat penyerapan anggaran di SKPD Kabupaten Magelang masih dibawah 100%.

Untuk pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja pada SKPD di Kabupaten Magelang?
2. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja pada SKPD di Kabupaten Magelang?
3. Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja pada SKPD di Kabupaten Magelang?
4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja pada SKPD di Kabupaten Magelang?
5. Apakah penerapan aplikasi SIPD berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja pada SKPD di Kabupaten Magelang?
6. Apakah regulasi, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, penerapan aplikasi SIPD secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja pada SKPD di Kabupaten Magelang?

Adapun untuk tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh regulasi terhadap penyerapan anggaran belanja pada SKPD di Kabupaten Magelang.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja pada SKPD di Kabupaten Magelang.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja pada SKPD di Kabupaten Magelang.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran belanja pada SKPD di Kabupaten Magelang.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan aplikasi SIPD terhadap penyerapan anggaran belanja pada SKPD di Kabupaten Magelang.
6. Menguji dan menganalisis pengaruh regulasi, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, penerapan aplikasi SIPD secara simultan terhadap penyerapan anggaran belanja pada SKPD di Kabupaten Magelang.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Telaah Teori

Teori Keagenan

Teori agensi menunjukkan hubungan antara dua pihak yang terlibat kontrak terdiri dari agen sebagai pihak yang diberi tanggung jawab atas tugas dan pinsipal sebagai pihak memberi tanggung jawab.

Penelitian ini didasarkan atas teori keagenan yang mengaitkan hubungan diantara pemerintah sebagai *agent* dan rakyat sebagai *principal*. Pemerintah sebagai pemegang amanah dari rakyat berkewajiban agar memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan serta mengungkapkan semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat selaku pihak pemberi amanah (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan sudah dipergunakan pada sektor publik baik di pemerintahan pusat maupun daerah.

Anggaran

Menurut Bastian (2006) anggaran merupakan pernyataan tertulis berupa ukuran finansial mengenai estimasi kinerja masa depan yang hendak dicapai selama periode tertentu biasanya satu tahun. Anggaran yang telah disusun akan dievaluasi pada akhir tahun untuk melihat apakah estimasi kinerja tersebut telah tercapai. Pencapaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja organisasi publik yang akan dicapai, dan diukur dalam bentuk kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Belanja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyerapan Anggaran

Menurut Halim (2014), bahwa penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah, masyarakat umum menyebutnya pencairan anggaran. Oleh karena yang diamati adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik, maka penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.

Perencanaan Anggaran

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan pada masa yang akan datang, sehingga penting dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan/pekerjaan. Menurut Halim & Kusufi (2012) mendefinisikan anggaran sebagai alat perencanaan anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja tersebut.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM pada intinya diarahkan untuk meningkatkan kualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Kemampuan Sumber Daya Manusia merupakan kualitas seseorang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya didalam sebuah instansi/perusahaan (Yunita & Putra, 2018). Permasalahan sumber daya manusia terjadi berawal dari rangkap tugas dalam panitia pengadaan, hal ini karena tidak seimbangnya antara paket pekerjaan dengan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan sehingga mengakibatkan belum optimalnya dalam penyerapan anggaran (Anfujatin, 2016).

Amiruddin (2009) mendefinisikan kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam menyusun kebijakan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan menurut *United Nations Development Programs* (2008), mengartikan kapasitas SDM sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau

individu, yang mengacu pada keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik sangat dibutuhkan didalam setiap SKPD karena mereka sebagai pelayan publik, aparatur pemerintah dan sebagai pelaku bisnis BUMN/BUMD yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki pengertian sebagai pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan kinerja yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (KAUR, 2008).

Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan aplikasi pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat. Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas yang dilaksanakan, yang terkait dengan penggunaan anggaran.

Telaah Penelitian Sebelumnya

1. Anisa (2017), judul penelitian Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Hasil penelitian Terdapat pengaruh Positif dan Signifikan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran. Terdapat pengaruh Positif dan Signifikan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.
2. Ramdhani & Anisa (2017) meneliti tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Hasil Penelitian Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
3. Mutmainna (2017) dengan penelitian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian Pergantian Pimpinan, Dokumen Perencanaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dokumen Pengadaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Pencatatan Administrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
4. Sanjaya et al. (2018) dengan judul Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada SKPD Provinsi Sumatera Barat. Hasil Penelitian Regulasi keuangan daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Politik Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap penyerapan anggaran.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.

5. Ramadhani & Setiawan (2019) dengan judul Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Provinsi Sumatera Barat. Hasil Penelitian Regulasi, Perencanaan Anggaran dan Pengadaan Barang/ Jasa berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja. Politik Anggaran dan Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran belanja pada SKPD Provinsi Sumatera Barat.
6. Weni Prabatiwi (2020) dengan Judul Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Studi Empiris di OPD Kota Magelang. Hasil politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja dan regulasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran belanja. Sedangkan perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Kota Magelang.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Sistem regulasi keuangan daerah adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan siklus keuangan daerah agar segala tindakan atas pengendalian tersebut dapat dirangkum dalam peraturan tertentu (Yunita & Putra, 2018). Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada.

Hasil penelitian Ramadhani & Setiawan (2019) menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara regulasi dengan penyerapan anggaran. Sejalan dengan hasil penelitian Widianingrum (2017) dan Salamah (2018) yang menyatakan bahwa faktor regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

H1. Regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja.

2. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja.

Menurut Arif dan Halim, 2013 (dalam Iqbal, 2018) bahwa semakin matang pengelola anggaran dalam merencanakan, maka program kerja/kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. Namun sebaliknya apabila perencanaan kegiatan yang kurang matang akan berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Perencanaan anggaran yang tidak baik sering menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga harus direvisi atau bahkan tidak dapat direalisasi sama sekali. Perencanaan anggaran juga memberi kontribusi bagi penyerapan anggaran pemerintah daerah.

Hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif (pemerintah) adalah *agent* dan legislatif (para wakil rakyat yang duduk di parlemen) adalah *principal*. Perspektif keagenan merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*) yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Semakin baik perencanaan anggaran yang disusun, akan memudahkan proses realisasi

pada tahun anggaran yang dilaksanakan sehingga meningkatkan penyerapan anggaran belanja.

Hasil penelitian Anfujatin (2016), Mutmainna (2017), Widianingrum (2017), Iqbal (2018), Ramadhani & Setiawan (2019) menyatakan bahwa faktor perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

H2. Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja.

3. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Pelaksanaan anggaran merupakan implementasi perencanaan anggaran yang telah di susun. Adapun yang terpenting dalam pelaksanaan anggaran adalah proses pelaksanaan anggaran itu sendiri. Sistem informasi akuntansi dan manajemen yang dipakai akan mempengaruhi proses pelaksanaan anggaran tersebut.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir (PP nomor 19 tahun 2019).

Teori agensi mewajibkan pemerintah sebagai agen mampu melaksanakan kontrak kerja kepada masyarakat. Pelaksanaan kontrak kerja tersebut dilaksanakan melalui realisasi program dan kegiatan. Inti dari pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan anggaran itu sendiri. Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satker, proses pengadaan barang dan jasa, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Ketiga hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran (Malahayati, 2015).

Penelitian Ramdhani & Anisa (2017) menemukan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Semakin baik pelaksanaan anggaran oleh SKPD akan berpengaruh pada tingginya tingkat penyerapan anggaran belanja.

H3. Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja.

4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Belanja.

Sumber daya manusia yang kompeten akan menjadi kelebihan tersendiri bagi organisasi pemerintah sekaligus sebagai pendukung daya saing pada era globalisasi dalam menghadapi lingkungan serta kondisi sosial masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dinamis. Sebaliknya, apabila suatu organisasi memiliki sumber daya manusia yang kurang kompeten akan berakibat pada menurunnya pencapaian tujuan organisasi.

Sesuai dengan teori keagenan, sumber daya manusia yang dipakai haruslah mampu melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak yang disepakati. ASN yang bekerja pada setiap SKPD memiliki perjanjian kinerja tertulis yang harus dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kemampuan yang dimiliki ASN akan sangat mempengaruhi hasil kinerja yang ditargetkan utamanya yang berkaitan dengan penyerapan anggaran SKPD. Hasil penelitian Anfujatin (2016), Nugroho (2017) dan

Mutmainna (2017) menyatakan bahwa faktor sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

H4. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja.

5. Pengaruh Penerapan Aplikasi SIPD terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

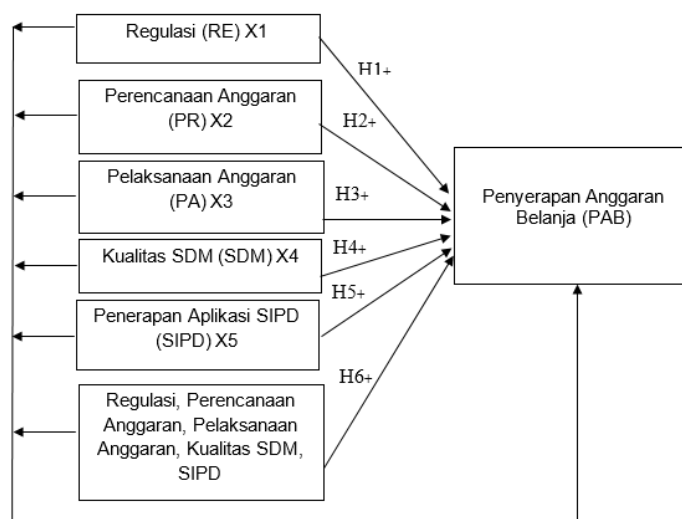
Sampai dengan saat ini Aplikasi SIPD belum bisa dimanfaatkan dengan optimal yang secara langsung berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja, kebijakan dari pemerintah pusat kepada setiap daerah untuk menggunakan aplikasi SIPD ini merupakan implementasi PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keterbatasan akses dan masih banyaknya penyesuaian pada aplikasi ini yang menyebabkan proses penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD masih terkendala sehingga setiap daerah mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur aplikasi pendamping SIPD dalam penatausahaan keuangannya.

Dalam proses penganggaran aplikasi SIPD sudah dapat berfungsi dengan baik hanya saja pada proses penatausahaan keuangan masih terkendala karena belum optimalnya sistem yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.

H5. Penerapan Aplikasi SIPD berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja.

Model Penelitian

Dari kerangka penelitian diatas memperlihatkan bahwa regulasi, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas SDM, penerapan aplikasi SIPD sebagai variabel independent diduga akan mempengaruhi variabel dependennya yaitu penyerapan anggaran belanja, sehingga dapat digambarkan pada bagan berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di Pemerintah Kabupaten Magelang. Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri dari Sekretariat

Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, 19 Dinas Daerah, 5 Badan Daerah, dan 21 Kecamatan. Penelitian berfokus pada SKPD di Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 24 SKPD dan 5 Kecamatan (merupakan sampel dari 21 Kecamatan dikarenakan kemiripan Program dan Kegiatan serta jumlah anggaran yang hampir sama).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Pertimbangan dalam penarikan sampel pada penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah Kabupaten Magelang yang menduduki jabatan yang berkaitan dengan anggaran, yaitu Kasubbag Keuangan dan Program, PPTK, Bendahara Pengeluaran, masing-masing diambil 3 responden sehingga jumlah sampel penelitian sebanyak 55 responden.

Teknik Pengambilan Sampel

1) Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data dikumpulkan secara langsung dari responden dengan sumber asli. Sumber tersebut adalah pegawai yang berkaitan dengan penyerapan anggaran di 29 SKPD Kabupaten Magelang. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pernyataan (kuesioner) yang terstruktur untuk dibagikan dan diisi oleh responden. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jawaban terhadap faktor-faktor yang diteliti meliputi regulasi, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan penerapan aplikasi SIPD.

2) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket yang berisi kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada para pegawai di SKPD Kabupaten Magelang, kemudian responden akan mengisi sesuai dengan pendapat dan pemikiran dari responden.

Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis data. Teknik ini menjadikan responden yang menjadi subyek penelitian harus bertanggungjawab untuk memilih dan menjawab pertanyaan maupun pernyataan.

Cara ini dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan metode survei yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui kuesioner lebih efektif dan efisien untuk dilakukan pada subjek yang jumlahnya banyak. Selain itu dengan data primer peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan, karena data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminir atau setidaknya dapat dikurangi.

Alat Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis (uji statistik *t* (*t-test*), uji *F* (*goodness of fit test*), dan uji koefisien determinasi (*adjusted R²*)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Data Umum

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Magelang. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD Kabupaten Magelang yang membidangi perencanaan, program dan keuangan. Terdapat 48 SKPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, 5 Badan, 19 Dinas dan 21 Kecamatan. Izin untuk melakukan penelitian, pengiriman kuesioner hingga pengisian data lewat *google form* dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian, formulir yang terisi dan dikirim sejumlah 59 responden. Adapun gambaran karakteristik data kuesioner dan deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Pengisian Kuesioner SKPD di Kabupaten Magelang

Uraian	Jumlah
Kuesioner yang terisi di google form	59
Jumlah kuesioner yang diolah	59
Tingkat pengisian kuesioner	100 %
Tingkat pengisian kuesioner yang dapat diolah	100 %

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Karakteristik Responden

Analisis ini memberikan gambaran secara terperinci tentang profil responden mengenai jabatan, usia, jenis kelamin, Pendidikan, latar belakang Pendidikan dan lama bekerja di SKPD. Berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, maka dapat menyajikan table 4.2 tentang profil responden.

Tabel 4.2 Profil Responden			
Kriteria	Jumlah	Presentase	
Jabatan			
Kasubbag Keuangan / Program	16	27%	
PPTK	6	11%	
Bendahara Pengeluaran	9	15%	
Staf Bagian Program/Keuangan	11	20%	
Lainnya	17	27%	
Jumlah	59	100%	
Usia			
< 30 tahun	4	7%	
30 - 50 tahun	46	80%	
≥ 51 tahun	9	13%	
Jumlah	59	100%	
Jenis Kelamin			
Laki – Laki	12	22%	
Perempuan	47	78%	
Jumlah	59	100%	

Pendidikan		
SMA/SMK/Sederajat	3	6%
Diploma	10	18%
S1	32	54%
Pasca Sarjana	14	22%
Jumlah	59	100%
Latar Belakang Pendidikan		
Akuntansi	16	27%
Manajemen	17	29%
Ilmu Sosial	8	13%
Lainnya	19	32%
Jumlah	59	100%
Kriteria	Jumlah	Presentase
Lama Bekerja		
< 10 tahun	5	9%
11 - 20 tahun	35	58%
21 - 30 tahun	15	26%
> 30 tahun	4	7%
Jumlah	59	100%

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini meliputi jumlah penelitian, nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi sebagaimana disajikan dalam tabel 4.3

Tabel 4.3
Hasil Uji Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAB	59	3	5	4.18	0.466
RE	59	3	5	4.19	0.450
PA	59	3	5	4.34	0.465
PL	59	3	5	4.19	0.487
SDM	59	3	5	3.62	0.578
SIPD	59	2	5	3.74	0.571
Valid N (listwise)	59				

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Ringkasan hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.4 dan 4.5.

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas

Variabel	KMO and Bartlett's Test	Keterangan
PAB	0,564	Valid
RE	0,586	Valid
PA	0,793	Valid

PL	0,583	Valid
SDM	0,723	Valid
SIPD	0,698	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Tabel 4.5
Cross Loading

Pernyataan	PAB	RE	PR	PL	SDM	SIPD	Keterangan
PAB1	0,667						Valid
PAB2	0,731						Valid
PAB3	0,852						Valid
RE1		0,795					Valid
RE2		0,680					Valid
RE3		0,783					Valid
PA1			0,699				Valid
PA2			0,757				Valid
PA3			0,838				Valid
PA4			0,696				Valid
PA5			0,856				Valid
PL1				0,822			Valid
PL2				0,732			Valid
PL3				0,720			Valid
SDM1					0,586		Valid
SDM2					0,436		Tidak Valid
SDM3					0,536		Valid
SDM4					0,853		Valid
SIPD1						0,615	Valid
SIPD2						0,624	Valid
SIPD3						0,727	Valid
SIPD4						0,552	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Hasil *cross loading* pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa indikator- indikator dengan nilai *cross loading* > 0,50 adalah valid. Namun terdapat 1 pernyataan yang tidak valid, yaitu SDM 2. Total pernyataan yang tidak valid sebanyak 4,55% dari total 22 pernyataan yang dipakai dalam penelitian. Pernyataan tersebut tidak valid karena memiliki nilai *cross loading* < 0,50, sehingga tidak dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

2) Uji Reliabilitas

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018).

Tabel 4.6
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
PAB	0,745	Reliabel
RE	0,787	Reliabel
PA	0,792	Reliabel
PL	0,815	Reliabel
SDM	0,709	Reliabel

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
SIPD	0,781	Reliabel

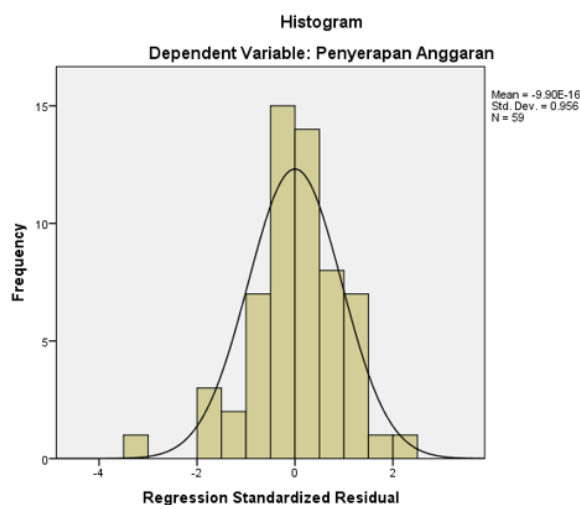
Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa variabel penyerapan anggaran belanja, regulasi, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas SDM, dan penerapan aplikasi SIPD memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

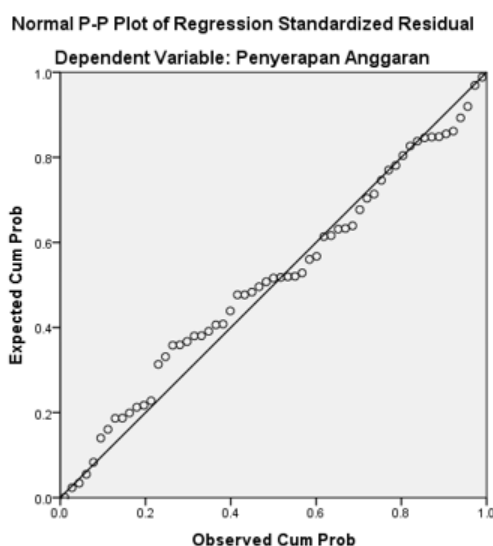
1) Uji Normalitas

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas Diagram Histogram



Gambar 4.2

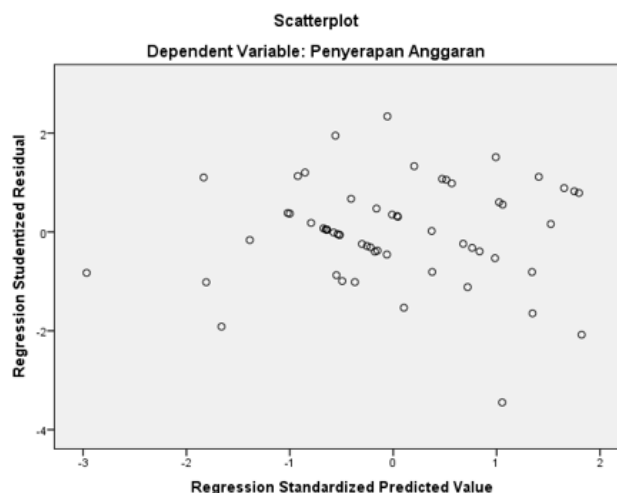
Hasil Uji Normalitas Diagram Probability Plots

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa hubungan dari variabel penyerapan anggaran terhadap regulasi, perencanaan anggaran, pelaksanaan

anggaran, kualitas SDM dan penerapan aplikasi SIPD adalah berdistribusi normal, hal ini ditunjukkan oleh gambar histogram yang tidak menceng ke kiri maupun ke kanan.

Sedangkan pada Gambar 4.2 data berdistribusi normal dapat dilihat pada *scatterplot*, terlihat titik-titik yang mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh.

2) Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar di atas dan dibawah titik 0 (nol) pada sumbu Y dan X serta tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien regresi yang disajikan dalam tabel 4.7.

Tabel 4.7
Koefisien Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.039	.536		1.936	.058
	Regulasi	.172	.151	.166	1.141	.259
	Perencanaan Anggaran	.202	.148	.201	1.364	.178
	Pelaksanaan Anggaran	.340	.151	.355	2.247	.029
	SDM	.003	.093	.004	.032	.975
	SIPD	.029	.096	.036	.303	.763

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Berdasarkan hasil koefisien regresi pada tabel 4.7 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PAB = 1,039 + 0,172RE + 0,202PA + 0,340PL + 0,003SDM + 0,029SIPD + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 1,039. Tanda positif menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel dependen dan variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independent meliputi regulasi (X1), perencanaan anggaran (X2), pelaksanaan anggaran (X3), kualitas SDM (X4) dan penerapan aplikasi SIPD (X5) bernilai 0 (nol) persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai penyerapan anggaran adalah 1,039.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel regulasi (X1) memiliki nilai positif sebesar 0,172, hal ini menunjukkan jika regulasi mengalami kenaikan 1%, maka penyerapan anggaran akan naik sebesar 0,172 dengan asumsi variabel independent lainnya dianggap konstan.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel perencanaan anggaran (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,202, hal ini menunjukkan jika regulasi mengalami kenaikan 1%, maka penyerapan anggaran akan naik sebesar 0,202 dengan asumsi variabel independent lainnya dianggap konstan.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel pelaksanaan anggaran (X3) memiliki nilai positif sebesar 0,340, hal ini menunjukkan jika regulasi mengalami kenaikan 1%, maka penyerapan anggaran akan naik sebesar 0,340 dengan asumsi variabel independent lainnya dianggap konstan.
5. Nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas SDM (X4) memiliki nilai positif sebesar 0,003, hal ini menunjukkan jika regulasi mengalami kenaikan 1%, maka penyerapan anggaran akan naik sebesar 0,003 dengan asumsi variabel independent lainnya dianggap konstan.
6. Nilai koefisien regresi untuk variabel penerapan aplikasi SIPD (X5) memiliki nilai positif sebesar 0,029, hal ini menunjukkan jika regulasi mengalami kenaikan 1%, maka penyerapan anggaran akan naik sebesar 0,029 dengan asumsi variabel independent lainnya dianggap konstan.

Pengujian Hipotesis

1) Uji t

Ringkasan hasil uji t disajikan dalam tabel 4.10.

Tabel 4.8
Uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
RE	1,141	1,671	0,259	H1 tidak diterima
PA	1,364	1,671	0,178	H2 tidak diterima
PL	2,247	1,671	0,029	H3 diterima
SDM	0,032	1,671	0,975	H4 tidak diterima
SIPD	0,303	1,671	0,763	H5 tidak diterima

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

a. Pengaruh Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa $t_{hitung} = 1.141 < t_{tabel} = 1,671$ dan $p\ value = 0,259 > \alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja sehingga **H1 tidak diterima**.

b. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa $t_{hitung} = 1,364 < t_{tabel} = 1,671$ dan $p\ value = 0,178 > \alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja sehingga **H2 tidak diterima**.

c. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa $t_{hitung} = 2,247 > t_{tabel} = 1,671$ dan $p\ value = 0,029 < \alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja sehingga **H3 diterima**.

d. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa $t_{hitung} = 0,032 < t_{tabel} = 1,671$ dan $p\ value = 0,975 > \alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran belanja sehingga **H4 tidak diterima**.

e. Pengaruh Penerapan Aplikasi SIPD terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa $t_{hitung} = 0,303 < t_{tabel} = 1,671$ dan $p\ value = 0,763 > \alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Penerapan Aplikasi SIPD tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja sehingga **H5 tidak diterima**.

2) Uji F

Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel 4.9.

Tabel 4.9
Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.388	5	1.078	7.903	.000 ^b
	Residual	7.227	53	.136		
	Total	12.616	58			
a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran						
b. Predictors: (Constant), SIPD, SDM, Perencanaan Anggaran, Regulasi, Pelaksanaan Anggaran						

Sumber: Data Primer yang diolah 2022

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas atau tingkatan signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$ dan F_{hitung} sebesar 7,903. Nilai F_{tabel} didapat dari $df = n - k - 1$. Berdasarkan jumlah responden ($n = 59$) dan jumlah variabel bebas ($k = 5$), maka $df_1 = k = 5$, $df_2 = n - k - 1 = 53$ maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,39. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $F_{hitung} 7,903 > F_{tabel} 2,39$ maka kesimpulannya adalah variabel regulasi, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas SDM dan penerapan aplikasi SIPD secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, sehingga H_0 tidak diterima dan H_a diterima yang berarti model penelitian layak atau *fit*.

3) Uji R² (Koefisien Determinasi)

Hasil analisis koefisien determinasi disajikan dalam tabel 4.8.

Tabel 4.10
Uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.654 ^a	.427	.373	.369
a. Predictors: (Constant), SIPD, SDM, Perencanaan Anggaran, Regulasi, Pelaksanaan Anggaran				

Sumber: Data Primer yang diolah 2020

Berdasarkan hasil uji *Adjusted R Square* pada tabel 4.8 besarnya R² adalah sebesar 0,373. Hal ini berarti bahwa variabel Regulasi (RE), Perencanaan Anggaran (PA), Pelaksanaan Anggaran (PL), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Penerapan Aplikasi SIPD (SIPD) dalam menjelaskan variabel Penyerapan Anggaran Belanja (PAB) sebesar 37,3%, sedangkan sisanya 62,7% dijelaskan oleh faktor – faktor dari luar model penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil pengujian bahwa t hitung = 1.141 < t tabel = 1,671 dan p value = 0,259 > α = 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan atau regulasi yang ada, dianggap tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Banyaknya aturan yang berubah secara cepat dalam pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagean yang mendukung terciptanya regulasi untuk proses penyerapan anggaran. Regulasi digunakan oleh SKPD dalam mewujudkan kebijakan organisasi menghadapi isu dan permasalahan yang ada. Ketentuan diperlukan agar semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat mendapatkan informasi yang sama dan seimbang.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai & Inapty (2016) dan Sanjaya et al. (2018) yang menyatakan bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Alimudin (2018) dan Ramadhani & Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaean belanja.

2. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa t hitung = 1,364 < t tabel = 1,671 dan p value = 0,178 > α = 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Hal ini dapat diartikan bahwa konsep perencanaan dan penentuan anggaran yang dilaksanakan oleh SKPD dengan berbagai permasalahan yang dihadapi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Permasalahan perencanaan yang sering terjadi adalah

adanya anggapan anggaran yang diusulkan tidak semuanya akan disetujui, akhirnya mengusulkan anggaran yang lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memikirkan kebutuhan riil yang ada di lapangan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan, Bahwa perspektif keagenan merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*) yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Semakin baik perencanaan anggaran yang disusun, akan memudahkan proses realisasi pada tahun anggaran yang dilaksanakan sehingga meningkatkan penyerapan anggaran belanja.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai & Inapty (2016) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyana (2017), Iqbal (2018), dan Ramadhani & Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja.

3. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil uji t hitung = 2,247 > t tabel = 1,671 dan p value = 0,029 < α = 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Hal ini dapat diartikan bahwa penyerapan anggaran belanja dipengaruhi oleh aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

Pelaksanaan anggaran pada SKPD Kabupaten Magelang mulai dari ditetapkannya anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan berdasarkan hasil penelitian cukup mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran belanja termasuk tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan, bahwa teori agensi mewajibkan pemerintah sebagai *agent* mampu melaksanakan kontrak kerja kepada masyarakat. Pelaksanaan kontrak kerja tersebut dilaksanakan melalui realisasi program dan kegiatan. Inti dari pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan anggaran itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ramdhani & Anisa (2017) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutmainna (2017) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.

4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Belanja.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa t hitung = 0,032 < t tabel = 1,671 dan p value = 0,975 > α = 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Hal ini dapat diartikan bahwa penyerapan anggaran belanja tidak dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada di antaranya adalah kurangnya jumlah pegawai, perangkapan pekerjaan, dan pola mutasi yang tidak merata. Hasil pengujian yang menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja membuktikan bahwa penyerapan anggaran belanja pada SKPD Kabupaten Magelang

tidak dipengaruhi oleh pengetahuan, kemampuan, motivasi dan persepsi pegawai yang memiliki.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan bahwa pemerintah sebagai *agent* memiliki peranan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan pembagian kerja yang tepat sesuai spesialisasinya sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai. SDM yang dipekerjakan haruslah mampu melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak yang disepakati. Kemampuan yang dimiliki ASN akan sangat mempengaruhi hasil kinerja yang ditargetkan utamanya yang berkaitan dengan penyerapan anggaran OPD.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Alimudin (2018), Ramadhani & Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak mempengaruhi penyerapan anggaran. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anfujatin (2016) dan Mutmainna (2017) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja.

5. Pengaruh Penerapan Aplikasi SIPD terhadap Penyerapan Anggaran Belanja.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa $t_{hitung} = 0,303 < t_{tabel} = 1,671$ dan $p_{value} = 0,763 > \alpha = 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Penerapan Aplikasi SIPD tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Hal ini dapat diartikan bahwa penyerapan anggaran belanja tidak dipengaruhi oleh penatausahaan keuangan yang telah menggunakan aplikasi SIPD.

SIPD yang dikembangkan oleh kemendagri ini tidak lepas dari ketidaksempurnaan pengembangan software masih banyak ditemukan kendala-kendala seperti menurut Nasution (2021) yaitu masih seringnya terjadi *Error System*, kurangnya koordinasi antar pelaksana SIPD, sering kali terjadi salah input dikarenakan terlalu banyaknya menu yang harus diisi sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian terhambat, dan hambatan lainnya dalam proses penyusunan anggaran kas, serta hambatan dalam pembuatan SPD, SPJ, SPP, SPM, dan SP2D. Tetapi dalam penelitian ini hal tersebut tidak mempengaruhi penyerapan anggaran belanja.

6. Pengaruh Regulasi, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Aplikasi SIPD Secara Simultan Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja.

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa $F_{hitung} 7,903 > F_{tabel} 2,39$ maka regulasi, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas SDM dan penerapan aplikasi SIPD secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja di SKPD Kabupaten Magelang.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan konsistennya sebuah regulasi, perencanaan anggaran yang terukur dan terencana, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan anggaran kas yang telah dibuat, kualitas SDM yang baik dan penerapan aplikasi SIPD dapat diimplementasikan dengan baik maka penyerapan anggaran akan semakin maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Temuan hasil dalam penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1. Regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.
Tingkat pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan atau regulasi yang ada dan banyaknya aturan yang berubah secara cepat dalam pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di instansi pemerintah Kabupaten Magelang.
2. Perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.
Permasalahan perencanaan yang sering terjadi adalah adanya anggapan anggaran yang diusulkan tidak semuanya akan disetujui, akhirnya mengusulkan anggaran yang lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memikirkan kebutuhan riil. Konsep perencanaan dan penentuan anggaran yang dilaksanakan oleh SKPD dengan berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di instansi pemerintah Kabupaten Magelang.
3. Pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.
Pelaksanaan anggaran pada SKPD Kabupaten Magelang mulai dari ditetapkannya anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan berdasarkan hasil penelitian cukup mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran belanja termasuk tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran tersebut.
4. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.
Kurangunya jumlah pegawai, perangkapan pekerjaan, pola mutasi yang tidak merata menunjukkan kualitas sumberdaya manusia di tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja instansi pemerintah Kabupaten Magelang.
5. Penerapan aplikasi SIPD tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.
Seringnya terjadi *Error System*, kurangnya koordinasi antar pelaksana SIPD, kesalahan *input* dikarenakan terlalu banyaknya menu yang harus diisi sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian terhambat, dan hambatan lainnya dalam proses penyusunan anggaran kas, serta hambatan dalam pembuatan SPD, SPJ, SPP, SPM, dan SP2D tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja instansi pemerintah Kabupaten Magelang.
6. Berdasarkan hasil uji *Adjusted R Square* variabel Regulasi, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Aplikasi SIPD hanya menjelaskan variabel Penyerapan Anggaran Belanja sebesar 37,3% sedangkan sisanya 62,7% dijelaskan oleh factor-faktor dari luar model penelitian ini.

Keterbatasan Penelitian

Objek dalam penelitian ini hanya 59 responden yang mewakili setiap SKPD di Kabupaten Magelang, ada beberapa SKPD yang tidak berpartisipasi dalam pengisian kuesioner yang dibagikan melalui google form sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk SKPD seluruh Kabupaten Magelang.

Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian, misalnya di seluruh SKPD Kabupaten Magelang dan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi penyerapan anggaran, misalnya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Politik Anggaran.
2. Bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Magelang disarankan agar meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran agar tingkat penyerapan anggaran meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimudin. (2018). Analisis Penyerapan Anggaran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makassar. Universitas Hasanudin.
- Amiruddin. (2009). Identifikasi dan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas plafon Anggaran Sementara. Universitas Gadjah Mada.
- Anfujatin. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Publik*. Universitas 17 Agustus Surabaya
- Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 2.
- Assery, S., Tjahjono, H., & Palupi, M. (2015). Perencanaan Sumberdaya Manusia Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing Perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 6(2), 419-428. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3740>
- Bastian, I. (2006). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah. Salemba Empat.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Salemba Empat.
- Dwiyana, N. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan dengan Monitoring dan Evaluasi Sebagai Variabel Moderating. Universitas Sumatera Utara.
- Gagola, L. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*. Universitas Sam Ratulangi
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam, & Latan, H. (2015). Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. BP Undip.
- Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.

- Handayani, C. H. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran SKPD Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2015 Dengan SiLPA Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*. Universitas Sumatera Utara
- Iqbal, M. (2018). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kopetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai pemoderasi. Universitas Hasanuddin.
- Jensen, & Meckling. (1976). Theory of the firm : managerial behavioral, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*.
- Kuncoro, M. (2013). Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi. UPP STIM YKPN.
- Malahayati, C. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. Pascasarjana Universitas Syah Kuala
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mutmainna. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Riset*. Universitas Fajar
- Nugroho, R. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). *Jurnal BPPK*. PKN STAN
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1, 710–726.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10.
- Renoat, R. E., & Latupeirissa, D. S. (2016). Pengaruh Variabel Perencanaan Anggaran, Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran.
- Weni, P. (2020). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Empiris di OPD Kota Magelang). Universitas Tidar Magelang
- Rifai, A., & Inapty, B. A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*. Universitas Mataram
- Salamah, S. (2018). Strategi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang
- Sanjaya, T., Arza, F. I., & Setiawan, M. A. (2018). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa terhadap Penyerapan Anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal PETA*, 3, 95–108.

- Subandi, S., & Hamid, M. S. (2021). STUDENT SATISFACTION, LOYALTY, AND MOTIVATION AS OBSERVED FROM THE SERVICE QUALITY. *Journal of Management and Islamic Finance*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/jmif.v1i1.3552>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta.
- Suwarni, D. E., & Ma'aruf, M. farid. (2018). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Surabaya(Studi pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pematusan). Universitas Negeri Surabaya
- Widianingrum, D. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Situbondo. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. Universitas Jember
- Yunita, N., & Putra, I. S. (2018). Faktor - Faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Belanja daerah guna Optimalisasi Pengelolaan keuangan daerah di Dinas Porbudpar Kota Blitar. *Jurnal PETA*. STIE Kesuma Negara Blitar

[CURRENT](#)[ARCHIVES](#)[EDITORIAL TEAM](#)[REVIEWER](#)[CONTACT](#)[ABOUT THE JOURNAL](#)[Q SEARCH](#)[HOME](#) / [Editorial Team](#)

Editorial Team

Editor in Chief:



Agung Slamet Prasetyo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Managing Editor:



Beta Asteria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Make a Submission

INFORMATION

[For Readers](#)[For Authors](#)[For Librarians](#)

EDITORIAL POLICIES

[Publication Ethic](#)[Editorial Team](#)[Reviewer](#)[Focus and Scope](#)[Author Guidelines](#)[Peer Review Process](#)



Sulastiningsih

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Editorial Board:



Mudasetia Hamid

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



John Suprihanto

Universitas Gadjahmada Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



Suhartono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Publication and Content Editor:

Isty Murdiani, SE

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 2808-1617

ISSN 2808-1617



TOOLS

zotero

INDEXING LIST



Support By



VISITORS



Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia

Jl. Lowanu Sorosutan UH VI / 20, Sorosutan, Kota Yogyakarta, DIY
55162
Email: jrabi@stieww.ac.id

Platform &
workflow by
OJS / PKP

JRABI is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)

